

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahsan, M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung.
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- De Soto, Hernando, 2000, *The Mystery of Capital*, Bhantam Press, Great Britain.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya (cetakan kedelapan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia: Jakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2024, *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah : Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang
- Khoidin, M., 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ke-6. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poesoko, Herowati, 2007, *Parate Executie Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Satrio, J., 2014, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simarmata, Rikardo 2015, *Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat*, Kemitraan bagi Reformasi Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta Selatan.

- Santoso, Marcella, 2024, *Legálitas dan Legitimasi Surat Keterangan Tanah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2015, *Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat*, Kemitraan bagi Reformasi Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Subekti, 1990, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, MARI: Jakarta (Proyek Pengembangan Teknis Yustisial).
- _____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjitroadinugroho, R., 1976, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarsasi, Putri A., 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Yudha, Hernoko Agus, 1998, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditas Perbankan Nasional*, Tesis, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Surat Edaran Menteri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat.

Peraturan Walikota Kota Palangkaraya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangkaraya

C. Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal

Alpianor, 2020, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya", *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

- Arrival, Nizam Zakka dan Siska Diana Sari, “Surat Keterangan Tanah: Keabsahan, Penggunaan dan Kelemahan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)* Vol. 5, No. 2, 2022.
- Atikah, Noor, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia”, *Notary Law Journal* Vol. 1, No. 3, 2022.
- Badruzaman, Mariam B., “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, *Hukum Bisnis* Vol. 11, 2000.
- Chandra, Isabella Dwinantya, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 6, No. 1, 2022.
- Eng, Pierre van der, “After 200 Years, Why Is Indonesia’s Cadastral System Still Incomplete?”, *Center for Economic History The Australian National University Discussion Paper Series*, 2016.
- Handoko, Wuri, 2012, “Surat Pernyataan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Di Desa Anjir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hanggono, Wahyu, 2022, “Analisa Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Kavling yang Belum Bersertifikat di Kota Palangkaraya Dalam Konsep Kepastian Hukum”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Mulyati, Etty dan Aprilianti Dwiputri, Fajrina, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, *Acta Diurnal*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Permata, Ratih Sulanjari, 2015, “Surat Pernyataan Tanah Sebagai Dasar Untuk Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Pratiwi, Astrian Endah, “Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang”, *Privat Law* Vol. V, No. 2, 2017
- Shabrina, Lina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing”, *Law, Development, and Justice Review* Vol. 3, No. 2, 2020.

Sihombing, Chenly Martua, “Pembebanan Hak Tanggungan Pada Tanah yang Belum Bersertifikat”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1, No. 2, 2021.

Simarmata, Rikardo, “Gejala Informalitas Pada Tanah Garapan”, *Law Reform*, Vol. 4, No. 2, 2009, hlm. 8-9

_____, “Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat”, *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Sumardjono, Maria, “Kredit Perbankan Permasalahannya Dalam Kaitan Dengan Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 7, No. 4, 1997.

Supena, Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 9, No. 2, 2023.

Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 4, 2020.

Wati, Annisa Febri, 2021 “Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Di Kantor Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”, *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2021

D. Internet

Anand, Ghansam “Langkah Hukum Jika Pengadilan Tak Kunjung Mengeksekusi Putusan”, *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengadilan-tak-kunjung-mengeksekusi-putusan-lt6166518c9b78b/> (diakses pada 24 Januari 2025).

Arif Hidayat, Muhhamad, “Menteri ATR/BPN Ingin Palangka Raya Segera Menjadi Kota Lengkap”, *antaranews.com*, <https://www.antaranews.com/berita/3826983/menteri-atr-bpn-ingin-palangka-raya-segera-menjadi-kota-lengkap> (diakses pada 10 November 2024).

Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya, “Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kota Palangkaraya 2021-2022”, <https://palangkakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg0IzI=/luas-kawasan-hutan-menurut-kecamatan-di-kota-palangka-raya.html> (diakses pada 8 November 2024).

Bahfein, Suhaiela dan Hilda B Alexander, “Kabar Terbaru, 112 Juta Bidang Tanah Terdaftar di Indonesia”, Kompas.com, <https://www.kompas.com/properti/read/2024/05/15/180000921/kabar-terbaru-112-juta-bidang-tanah-terdaftar-di-indonesia>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdota”, djkn.kemenkeu.go.id, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdota.html>

Kota Administrasi Jakarta Pusat, Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, akarta.go.id/kota-administrasi-jakarta-pusat (diakses pada 10 November 2024).

Oktavira, Bernadetha A, “Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>

Parlindungan, Adi Putra “Konversi Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia,” Kompas, 1992, www.Kompas.com

Pemerintah Kota Palangkaraya, “Geografis dan Iklim”, palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/, (diakses pada 7 November 2024).

Redaksi OCBC NISP, “Perbedaan Hutang dan Piutang yang Wajib Diketahui Pebisnis”, ocbc.id, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/08/perbedaan-hutang-dan-piutang>

Thea, Ady, “Menteri ATR/BPN Target PTSL 126 Juta Bidang Tanah Terealisasi 2025”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-atr-bpn-target-ptsl-126-juta-bidang-tanah-teralisasi-2025-lt6471f0b547a42/>

Widjaja, Djustiawan, et. al, “Evaluasi Program PTSL dalam Mengurangi Permasalahan Agraria”, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Komisi II DPR RI, (<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-86.pdf>), 2022.

Yanwardhana, Emir, “Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!”, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>

E. Sumber lain

Catatan perkuliahan Penulis dalam kelas Hukum Pertanahan oleh pematari Rikardo Simarmata.

Hasil Wawancara dengan Bapak B dan Ibu Y selaku warga Kelurahan Habaring Hurung pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 17.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Rasyid Selaku Kasi Pemerintahan, Keamanan, dan Ketertiban Kelurahan Habaring Hurung pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 09.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Rasyid Selaku Kasi Pemerintahan, Keamanan, dan Ketertiban Kelurahan Habaring Hurung pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 09.00

Hasil wawancara dengan Lestiana selaku perwakilan dari pihak Bank BRI Unit Tangkiling yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 15.00

Hasil wawancara dengan Olivia Priscilla selaku perwakilan dari pihak Bank BRI Unit Tangkiling yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 15.00

Materi Presentasi Kaleka, Pembahasan Kasus AAL dan Komentar terhadap Kasus PTPN V, “Tanggapan Pengacara Berdasarkan Kepakaran Hukum di Bidang Agraria Adat, Perkebunan, dan Pertanahan”

Surat Pengakuan Hutang atas nama AS tertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tangkiling

Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Habaring Hurung, dengan nomor SPT 102/Pem/HH-II/2024

Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Sei Gohong, dengan nomor SPT 40/SPT/PEM/SG-VIII/2021